

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR 1/KN/KN.1/2022

TENTANG

PEDOMAN PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 121/KN/2021 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Naskan Dinas Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan pengelolaan tata naskah dinas berdasarkan ketentuan, dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.1/SJ.2/2022 tentang Penomoran dan Cap Dinas pada Kantor Pusat di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KM.1/SJ.2/2022 tentang Penomoran dan Cap Dinas di Lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu mengganti Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 121/KN/2021 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Naskan Dinas Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - c. bahwa pada Diktum KESEPULUH Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penomoran dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan menyatakan naskah dinas untuk jabatan fungsional penetapannya dapat dilakukan oleh Sekretaris unit Eselon I atas nama pimpinan unit Eselon I bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pedoman Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat
- 1. Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian



Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1213);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 912/KMK.01/2019 tentang Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.01/2021 tentang Pedoman Penomoran dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.1/SJ.2/2022 tentang Penomoran dan Cap Dinas pada Kantor Pusat di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KM.1/SJ.2/2022 tentang Penomoran dan Cap Dinas di Lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Memperhatikan : Persetujuan dari Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam ND-207/SJ.2/2022 hal Persetujuan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Pedoman Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, terdiri atas:
- a. kode naskah dinas jabatan fungsional Pelelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. kode naskah dinas jabatan fungsional Penilai Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. kode naskah dinas jabatan fungsional Penata Laksana Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - d. kode naskah dinas jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. kode naskah dinas jabatan fungsional Pranata Komputer sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
  - f. kode naskah dinas jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
  - g. kode naskah dinas jabatan fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
  - h. kode naskah dinas jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
  - i. kode naskah dinas jabatan fungsional Pranata Humas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
  - j. kode naskah dinas jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Penerbitan naskah dinas jabatan fungsional dilaksanakan dengan mengacu pada kewenangan jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam ketentuan terkait Pedoman Tata Naskah Dinas dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- KEEMPAT : Naskah dinas yang telah diterbitkan dengan menggunakan kode dan penomoran sebelum ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini, dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 121/KN/2021 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Pemberlakuan kode naskah dinas jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur pada Keputusan Direktur Jenderal ini:
- a. Pada Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berlaku sejak dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  - b. Pada Lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2022.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD

DEDI SYARIF USMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



Moh. Arif Rochman *RS*,

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA NOMOR  
1/KN/KN.1/2022  
TENTANG PEDOMAN PENOMORAN DAN  
PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA

KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

NO	NAMA UNIT ORGANISASI INDUK/ JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	KODE NASKAH DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Pelelang Ahli Utama	.../(Kode Unit Organisasi)/Plg.1/...
2	Pelelang Ahli Madya	.../(Kode Unit Organisasi)/Plg.2/...
3	Pelelang Ahli Muda	.../(Kode Unit Organisasi)/Plg.3/...
4	Pelelang Ahli Pertama	.../(Kode Unit Organisasi)/Plg.4/...

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD

DEDI SYARIF USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



Moh. Arif Rochman *AR*,

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA NOMOR  
1/KN/KN.1/2022  
TENTANG PEDOMAN PENOMORAN DAN  
PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA

KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

NO	NAMA UNIT ORGANISASI INDUK/ JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	KODE NASKAH DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Penilai Pemerintah Ahli Utama	.../(Kode Unit Organisasi)/PiPem.1/....
2	Penilai Pemerintah Ahli Madya	.../(Kode Unit Organisasi)/PiPem.2/....
3	Penilai Pemerintah Ahli Muda	.../(Kode Unit Organisasi)/PiPem.3/....
4	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	.../(Kode Unit Organisasi)/PiPem.4/....

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD

DEDI SYARIF USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



Moh. Arif Rochman *AR*

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA NOMOR  
1/KN/KN.1/2022  
TENTANG PEDOMAN PENOMORAN DAN  
PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA

KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG

NO	NAMA UNIT ORGANISASI INDUK/ JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	KODE NASKAH DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Penata Laksana Barang Penyelia	.../ (Kode Unit Organisasi)/PtLB.5/...
2	Penata Laksana Barang Mahir	.../ (Kode Unit Organisasi)/PtLB.6/...
3	Penata Laksana Barang Terampil	.../ (Kode Unit Organisasi)/PtLB.7/...

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD

DEDI SYARIF USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



Moh. Arif Rochman *Ar*

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA NOMOR  
1/KN/KN.1/2022  
TENTANG PEDOMAN PENOMORAN DAN  
PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA

KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

NO	NAMA UNIT ORGANISASI INDUK/ JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	KODE NASKAH DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Pustakawan Ahli Muda	.../(Kode Unit Organisasi)/Pus.3/....
2	Pustakawan Ahli Pertama	.../(Kode Unit Organisasi)/Pus.4/....
3	Pustakawan Penyelia	.../(Kode Unit Organisasi)/Pus.5/....
4	Pustakawan Mahir	.../(Kode Unit Organisasi)/Pus.6/....
5	Pustakawan Terampil	.../(Kode Unit Organisasi)/Pus.7/....

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD

DEDI SYARIF USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



Moh. Arif Rochman

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA NOMOR  
1/KN/KN.1/2022  
TENTANG PEDOMAN PENOMORAN DAN  
PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA

KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

NO	NAMA UNIT ORGANISASI INDUK/ JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	KODE NASKAH DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Pranata Komputer Ahli Madya	.../(Kode Unit Organisasi)/Prakom.2/....
2	Pranata Komputer Ahli Muda	.../(Kode Unit Organisasi)/Prakom.3/....
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	.../(Kode Unit Organisasi)/Prakom.4/....
4	Pranata Komputer Penyelia	.../(Kode Unit Organisasi)/Prakom.5/....
5	Pranata Komputer Mahir	.../(Kode Unit Organisasi)/Prakom.6/....
6	Pranata Komputer Terampil	.../(Kode Unit Organisasi)/Prakom.7/....

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD

DEDI SYARIF USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.p. Kepala Bagian PBMNRTTU,



Moh. Arif Rochman

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA NOMOR  
1/KN/KN.1/2022  
TENTANG PEDOMAN PENOMORAN DAN  
PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA

KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

NO	NAMA UNIT ORGANISASI INDUK/ JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	KODE NASKAH DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Arsiparis Ahli Madya	.../ (Kode Unit Organisasi)/ Ars.2/ ...
2	Arsiparis Ahli Muda	.../ (Kode Unit Organisasi)/ Ars.3/ ...
3	Arsiparis Ahli Pertama	.../ (Kode Unit Organisasi)/ Ars.4/ ...
4	Arsiparis Penyelia	.../ (Kode Unit Organisasi)/ Ars.5/ ...
5	Arsiparis Mahir	.../ (Kode Unit Organisasi)/ Ars.6/ ...
6	Arsiparis Terampil	.../ (Kode Unit Organisasi)/ Ars.7/ ...

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD

DEDI SYARIF USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kepala Bagian PBMNRTTU,



Moh. Arif Rochman

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA NOMOR  
1/KN/KN.1/2022  
TENTANG PEDOMAN PENOMORAN DAN  
PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA

KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN

NO	NAMA UNIT ORGANISASI INDUK/ JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	KODE NASKAH DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	.../(Kode Unit Organisasi)/APK-APBN.2/...
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	.../(Kode Unit Organisasi)/APK-APBN.3/...
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	.../(Kode Unit Organisasi)/APK-APBN.4/...

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD

DEDI SYARIF USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



Moh. Arif Rochman

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA NOMOR  
1/KN/KN.1/2022  
TENTANG PEDOMAN PENOMORAN DAN  
PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA

KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN

NO	NAMA UNIT ORGANISASI INDUK/ JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	KODE NASKAH DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Pranata Keuangan APBN Penyelia	.../(Kode Unit Organisasi)/Prakeu-APBN.5/...
2	Pranata Keuangan APBN Mahir	.../(Kode Unit Organisasi)/Prakeu-APBN.6/...
3	Pranata Keuangan APBN Terampil	.../(Kode Unit Organisasi)/Prakeu-APBN.7/...

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD

DEDI SYARIF USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



Moh. Arif Rochman *AR*,

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA NOMOR  
1/KN/KN.1/2022  
TENTANG PEDOMAN PENOMORAN DAN  
PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA

KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

NO	NAMA UNIT ORGANISASI INDUK/ JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	KODE NASKAH DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Pranata Humas Ahli Madya	.../ (Kode Unit Organisasi)/Prahum.2/...
2	Pranata Humas Ahli Muda	.../ (Kode Unit Organisasi)/Prahum.3/...
3	Pranata Humas Ahli Pertama	.../ (Kode Unit Organisasi)/Prahum.4/...
4	Pranata Humas Penyelia	.../ (Kode Unit Organisasi)/Prahum.5/...
5	Pranata Humas Mahir	.../ (Kode Unit Organisasi)/Prahum.6/...
6	Pranata Humas Terampil	.../ (Kode Unit Organisasi)/Prahum.7/...

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD

DEDI SYARIF USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



Moh. Arif Rochman *kr*

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA NOMOR  
1/KN/KN.1/2022  
TENTANG PEDOMAN PENOMORAN DAN  
PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA

KODE NASKAH DINAS  
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR SDM APARATUR

NO	NAMA UNIT ORGANISASI INDUK/ JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	KODE NASKAH DINAS
(1)	(2)	(3)
1	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	.../(Kode Unit Organisasi)/ArSA.2/...
2	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	.../(Kode Unit Organisasi)/ArSA.3/...
3	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	.../(Kode Unit Organisasi)/ArSA.4/...

a.n. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

TTD

DEDI SYARIF USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u. b. Kepala Bagian PBMNRTTU,



Moh. Arif Rochman